Halaman

Kejatisu Periksa SEVP PTPN I

Dari Halaman 1

kedatangan alumnus Fakultas Hukum USU tersebut.

"Nanti kita monitor ke tim, Bang," terangnya via aplikasi perpesanan.

Sementara, menganalisis dari kebiasaan Ganda Wiatmaja yang suka memberikan informasi terbalik, masyarakat berharap Kajatisu Harli Siregar tidak memberikannya Justice Collaborator atau perlindungan hukum karena mau bekerjasama memberi informasi.

Kajatisu Harli Siregar harus menelaah secara teliti setiap kalimat yang disampaikannya, sehingga ia mampu memposisikan dirinya secara netral, bukan sebagai playing victim.

"Kami berharap ia diperiksa secara serius. Setiap informasi dari Ganda harus ditelaah dan tidak dibuat sebagai justice collaborator atau alat untuk bekerjasama sehingga ia tidak terjerat hukum jika dikemudian hari ditemukan bukti keterlibatannya," ungkapnya Praktisi Hukum Jauli Manalu, dilansir dari Aktual Online, Selasa (21/10).

Pasalnya, dalam pelaksanaan proyek Deli Megapolitan, di salah satu media online yang terbit 14 April 2025 Ganda Wiatmaja telah berseberangan dengan Kejatisu dengan mengatakan bahwa proyek Deli Megapolitan ini sudah melalui kajian dan penelitian menyeluruh.

Penanganan perkara dugaan tindak pidana

korupsi pada pengelolaan / penjualan / pengalihan aset PTPN I Regional I oleh PT. Nusa Dua Propertindo (NDP) melalui Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. Ciputra Land seluas 8.077 Hektar, telah menyeret Direktur PT. NDP yang merupakan perusahaan bentukan PTPN Regional I.

Penyidik telah menjebloskan dua tersangka berinisial ASK dan ARL selaku mantan kepala pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumut dan Deli Serdang.

"Dari hasil penyidikan diketahui bahwa kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2023 atau pada masa jabatan tersangka IS selaku Direktur PT. NDP, telah mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas beberapa bidang tanah yang berstatus sebagai Hak Guna Usaha PTPN II, permohonan tersebut diajukan tersangka kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang secara bertahap," beber Husairi, PLT Kasipenkum Kejati Sumut.

Dilanjutkannya, kemudian diketahui bahwa dalam upaya merubah HGU atas nama PTPN II menjadi HGB an. PT. NDP tersebut, tersangka bersama-sama dengan tersangka ASK (selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 s/d 2024) dan ARL (selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 s/d 2025) dalam berkas perkara terpisah.

"Perbuatan tersangka menyebabkan Surat HGB atas nama PT. NDP yang berasal dari perubahan

HGU PTPN II diterbitkan dan disetujui meskipun dalam prosesnya tanpa memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh negara,' ungkapnya lagi.

Masih menurut Husairi, penahanan terhadap tersangka IS"l dilakukan setelah tim penvidik melakukan serangkaian pemeriksaan secara intensif yang kemudian telah ditemukan minimal dua alat bukti yang cukup

"Hingga selanjutnya kepada tersangka dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan dari Kajati Sumatera Utara Nomor: PRINT-23/L.2/Fd.2/10/2025 tanggal 20 Oktober 2025 dengan perintah melakukan penahanan terhadap para tersangka selama dua puluh hari pertama pada Rutan Kelas IA Tanjung Gusta Medan," tegasnya.

Terhadap tersangka dijerat dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Apabila diperoleh bukti keterlibatan pihak lain dalam perkara ini maka tim penyidik akan melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya," pungkasnya. (A-10)

Dedi Mulyadi Tantan

Dari Halaman 1

alias diparkir dalam bentuk deposito. Sebelumnya, Purbaya menyebut ada 15 pemerintah daerah menempatkan dana kasnya di bank, termasuk Jawa Barat. Purbaya menyebut Pemprov Jabar memiliki deposito senilai Rp4,17 triliun.

Dedi mengklaim sudah mengecek langsung informasi tersebut ke Bank BJB, bank daerah tempat Pemprov Jabar menyimpan kasnya.

"Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam bentuk deposito," kata Dedi dalam rilis yang diterima wartawan, Selasa (21/10).

Menurut Dedi, bila benar ada pemerintah daerah yang menempatkan uang daerahnya dalam deposito, hal itu merupakan bentuk ketidakmampuan dalam mengelola keuangan publik. Ia meminta Purbaya untuk membuka data secara transparan agar tidak menimbulkan opini negatif di masyarakat.

"Kesannya pemerintah daerah dituding lebih banyak belanja aparatur daripada belanja publik, lalu memarkir dana untuk memperoleh sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Ini bisa merugikan daerah yang sebenarnya bekerja dengan baik," ujarnya.

Dedi mengklaim Pemprov Jabar justru tengah mempercepat realisasi belanja publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menegaskan tidak ada dana APBD Jawa Barat yang diendapkan untuk kepentingan apa pun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengutip data Bank Indonesia yang mencatat total dana mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun. Angka itu terdiri atas simpanan pemerintah kabupaten Rp134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp39,5 triliun.

Purbaya; menyoroti praktik sejumlah Pemda yang menempatkan dananya di bank-bank pusat, bukan di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menurutnya, hal ini menyebabkan peredaran uang di daerah terhambat.

"Daerahnya jadi kering, barangnya enggak bisa muter. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biarkan uangnya di daerah," ucapnya.(cnni/js)

Pakar dan DPR Minta KPK Proaktif

Dari Halaman 1

pulkan informasi lain dan kemudian melakukan telaah.

"Nah, KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan bisa menindaklanjutinya dengan mengumpulkan informasi lain untuk kemudian dilakukan telaah," kata Zaenur saat dihubungi, Selasa (21/10).

Menurut dia, KPK bisa memanggil para pihak untuk dimintai keterangan, bahkan bisa melakukan investigasi dengan melihat dokumen pengadaan proyek.

Zaenur menyebut KPK wajib menelaah setiap informasi sekecil apapun dari masyarakat terkait dugaan kasus korupsi. Menurut dia, KPK harus memastikan apakah informasi tersebut benar atau tidak terjadi kasus korupsi

"Aparat penegak hukum itu betul bisa menerima laporan, tapi juga bisa proaktif. Mereka juga bisa mengumpulkan bahan keterangan. Jadi prinsip dasarnya aparat harus mengumpulkan segala sumber informasi untuk dapat mendeteksi, mengetahui dugaan tindak pidana,"

Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo meminta KPK proaktif soal informasi awal

dugaan mark up dalam proyek Whoosh. Menurut dia, aparat penegak hukum bisa mendalami setiap pekerjaan negara yang patut diduga menimbulkan kerugian negara.

"Penegak hukum tidak boleh pasif, justru harus aktif. Bilamana itu sudah menjadi kuat dugaan ya, justru penegak hukum tidak boleh menunggu laporan saja. Kalau menunggu laporan tidak ada kasus yang diungkap," kata Lallo saat dihubungi, Selasa (21/10).

KPK sebelumnya meminta Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

"Terima kasih informasi awalnya, dan jika memang Prof Mahfud ada data yang nanti bisa menjadi pengayaan bagi KPK, maka kami akan sangat terbuka untuk kemudian mempelajari dan menganalisisnya," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/10).

Mahfud mengaku bingung dengan respons KPK. Sebab, menurut dia, dalam hukum pidana, lembaga penegak hukum bisa langsung melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan.

"Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan," kata dia.

Dugaan isu mark up dalam proyek Whoosh semula disampaikan Mahfud dalam siniarnya pada 14 Oktober 2025, yang menyebut ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.

"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," katanya.

Ia melanjutkan, "Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah, itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini."

Mahfud belakangan lewat twitnya di X menyatakan bahwa info yang ia sampaikan dalam podcast-nya itu merujuk pada siaran NusantaraTV dalam rubrik 'Prime Dialog' edisi 13 Oktober 2025 dengan narasumber Agus Pambagyo dan Antony Budiawan.(cnni/js)

Oknum Polisi Curi

Dari Halaman 1

senpi-senpi tersebut diduga dicuri sejak 2017 lalu oleh seorang oknum anggota Polda NTT.

"Total ada sembilan pucuk yang disalahgunakan atau digelapkan dari gudang senjata", kata Henry melalui keterangan tertulis, Senin (20/10).

Tapi Henry belum merinci jenis senjata api yang dicuri dan identitas dari oknum anggota Polda NTT pelaku pencurian senjata api tersebut.

Dia menjelaskan, pengungkapan hilangnya sembilan senjata api dari gudang tersebut berawal dari perintah dan arahan Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko untuk melakukan analisis dan evaluasi pengelolaan senjata api di seluruh satuan kerja wilayah hukum Polda NTT pada awal Oktober lalu. (cnni/js)

Nadiem Diperiksa di Rutan Kejari Jaksel.....

Dari Halaman 1

di Rutan Salemba Kejari Jaksel karena alasan efektivitas dan kesehatan yang bersangkutan.

"Rutannya di sana, terus yang kedua juga secara lokasi, maksudnya baru sembuh dari kesehatan operasi, supaya tidak terlalu jauh," tuturnya.

Kendati demikian, Anang enggan mengungkap lebih jauh ihwal materi pemeriksaan yang didala-

mi penyidik. Ia hanya menjelaskan pemeriksaan berkaitan dengan pengadaan Chromebook.

Sebelumnya PN Jakarta Selatan memutuskan menolak permohonan gugatan praperadilan eks Mendikbud Nadiem Makarim terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Kejagung.

"Mengadili dan menolak nermohonan nran eradilan pemohon," kata Hakim Tunggal I Ketut Darpawan di ruang sidang Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan, Selasa (13/10).

Darpawan menilai penetapan tersangka Nadiem oleh penyidik Kejagung telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku, artinya status tersangka Nadiem tetap sah dan tidak digugurkan.

Melalui putusan sidang praperadilan tersebut, enyidikan kasus dugaan korupsi proyek program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek atas tersangka Nadiem tetap dilanjutkan.(cnni/js)

KPK Periksa 5 Saksi di Yogyakarta

Dari Halaman 1

Ramadhan Wisata, TW selaku Direktur PT Firdaus Mulia Abadi, dan RAA selaku Direktur PT Hajar Aswad Mubaroq," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (21/10).

Selain itu, KPK juga memeriksa seorang saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, yakni GHW selaku Manajer Operasional Kantor Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (Amphuri). Berdasarkan catatan KPK, GHW telah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.37 WIB.

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, salah sa-

tunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus tersebut.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.(ant/js)

Rapat Paripurna di Tengah Genangan

Dari Halaman 1

Yang lebih ironis, setiap tahun pula dewan terhormat selalu mengetuk palu menyetujui anggaran penanganan banjir. Tak ada yang menolak, tak ada yang bertanya mengapa hasilnya nihil. Rapat paripurna berjalan lancar, air mata warga tetap mengalir. Barangkali, di ruang paripurna itu, banjir sudah berubah rupa bukan lagi air yang menenggelamkan rumah, tapi angka-angka yang menenggelamkan nurani.

Begitulah, anggaran banjir seperti ritual tahunan yang tak pernah putus. Masuk ke RAPBD, dibahas sekilas, lalu disetujui seperti membaca doa wajib yang tak perlu direnungi maknanya. Tidak ada audit yang benar-benar membongkar, tidak ada keberanian yang menyoal. Sementara itu, di luar gedung megah itu, warga menyibak air selutut demi menjemput

anak sekolah.

Mungkin karena di antara genangan itu, ada yang justru menemukan keuntungan. Setiap kali air naik, proyek pun naik. Setiap kali hujan datang, tender baru pun datang. Dan banjir, alih-alih menjadi musibah, berubah jadi berkah bagi sebagian orang. Air yang bagi warga menjadi petaka, bagi segelintir manusia justru mengalirkan rezeki dari sumber yang

Dewan mestinya menjadi rem bagi kebijakan yang salah arah. Tapi di negeri ini, rem dan gas sering dikendalikan oleh tangan yang sama. Maka jangan heran kalau banjir tak pernah surut, karena 'kesepakatan" tentangnya pun sudah mengalir begitu

Sesekali, kita patut bertanya: untuk siapa sebenarnya anggaran itu digelontorkan? Untuk warga yang menunggu air surut, atau untuk mereka yang menunggu tanda tangan proyek? Untuk keringnya jalanan, atau untuk basahnya kantong-kantong tertentu?

Dalam Islam, amanah bukan sekadar kata yang manis di spanduk rapat. Ia adalah beban yang akan ditagih, kelak, di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Maka sungguh malanglah para pemimpin yang menandatangani proyek banjir dengan tangan, namun menandatangani kebinasaan dengan nuraninya sendiri.

Kita boleh menunda pembangunan, tapi jangan menunda kejujuran. Sebab, banjir yang paling menakutkan bukanlah yang datang dari langit, melainkan yang keluar dari hati manusia yakni saat ia tak lagi takut pada hisab, dan tak malu pada rakyat yang diguyur janji.(*)

KPU Ternyata Pakai Private Jet Bukan Buat

Dari Halaman 1

lasa (21/10).

Dalam perkara itu, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin selaku teradu I, beserta lima anggotanya, yaitu: Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, August Mellaz, dan Betty Epsilon Idroos (masing-masing sebagai teradu II sampai VI). Pengadu juga mengadukan Sekretaris Jendral KPU RI, Bernard Dermawan Sutrisno (teradu VII).

Dalam pertimbangannya, Anggota Majelis Ratna Dewi mengatakan tindakan teradu I sampai dengan teradu V dan teradu VII dalam penggunaan private

jet tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu.

Terlebih, teradu I sampai dengan teradu V dan teradu VII memilih private jet dengan jenis yang eksklusif dan mewah.

Ratna mengatakan, dalih teradu I bahwa pertimbangan penggunaan private jet karena masa kampanye pada pemilu tahun 2024 hanya berlangsung 75 hari, sehingga waktu untuk pengadaan dan distribusi logistik pemilu 2024 sangat sempit, tidak dapat diterima.

"Bahwa penggunaan private jet tidak sesuai dengan perencanaan awal untuk monitoring distribusi logistik di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar.

Bahwa di antara 59 kali perjalanan menggunakan private jet tidak ditemukan satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik," kata Ratna.

Private jet itu justru digunakan komisioner KPU untuk monitoring gudang logistik ke beberapa daerah, menghadiri pembimbingan teknis kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), menghadiri kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pemilu serentak

Selain itu, untuk menghadiri penyerahan santunan petugas badan ad-hoc, dan monitoring kesiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam kurung PSU pada pemilu tahun 2024 di Kuala Lumpur. .(ant/js)

Hidayah Menata Ulang Pengalihan Lahan

Dari Halaman 1

kali menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka kehilangan lahan, sumber penghidupan, dan bahkan identitas sosial yang telah terbangun selama puluhan tahun.

Agar pengalihan lahan menjadi win-win solution bagi semua pihak negara, masyarakat, dan pengembang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara serius.

Pertama, pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan proses pengalihan lahan benar-benar sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Proses perubahan status tanah, kewajiban penyerahan aset negara, serta kompensasi kepada masyarakat harus dilakukan secara terbuka. Setiap dokumen dan izin sebaiknya dapat diakses publik untuk mencegah penyimpangan. Ketertutupan sering menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi, kolusi, dan manipulasi nilai aset negara.

Kedua, masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi

Mereka harus dilibatkan dalam setiap tahap konsultasi dan perencanaan. Pemerintah dan pengembang wajib memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat seperti akses terhadap lahan, pekerjaan, lingkungan hidup yang layak, serta kompensasi yang adil tetap dilindungi. Banyak konflik agraria di Indonesia muncul bukan karena masyarakat menolak pembangunan, melainkan karena mereka merasa dipinggirkan dari proses pengambilan keputusan.

Ketiga, rencana penggunaan lahan baru harus memperhatikan aspek lingkungan, infrastruktur, dan tata ruang. Pengalihan lahan yang tidak matang dalam perencanaan justru menciptakan masalah baru: banjir akibat alih fungsi hutan, kemacetan akibat padatnya kawasan baru, dan ketimpangan sosial antara pendatang dan warga lama. Pemerintah daerah harus berani menolak proyek yang mengorbankan keseimbangan ekologis dan sosial, meski secara ekonomi tampak menguntungkan.

Keempat, harus ada mekanisme pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap hasil pengalihan lahan. Apakah masyarakat lokal benar-benar mendapatkan manfaat lapangan kerja, fasilitas publik, atau peningkatan kesejahteraan? Apakah negara memperoleh nilai yang layak dari asetnya? Dan apakah pengembang menepati semua kewajiban yang telah disepakati? Tanpa evaluasi, pengalihan lahan hanya akan menjadi "transaksi sesaat" yang meninggalkan ketidakadilan jangka panjang.

Dalam konteks pembangunan nasional, tanah bukan sekadar komoditas ekonomi. Ia memiliki dimensi sosial, budaya, dan bahkan spiritual. Bagi masyarakat lokal, tanah adalah bagian dari identitas dan sejarah. Karena itu, pengelolaan lahan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi, bukan semata logika pasar.

Kita tentu tidak menolak pembangunan. Namun pembangunan sejati bukan hanya tentang gedung yang menjulang, melainkan juga tentang manusia yang sejahtera dan lingkungan yang lestari. Pemerintah, pengembang, dan masyarakat harus duduk bersama dalam prinsip gotong royong untuk memastikan bahwa setiap jengkal tanah yang dialihkan membawa manfaat bagi sebanyak mung-

Jika prinsip transparansi, partisipasi, dan keadilan dijalankan, maka pengalihan lahan tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk memperkuat kedaulatan negara sekaligus menumbuhkan kesejahteraan rakyat.(*)